

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Maka pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam menggali dan mengembangkan potensinya dalam merencanakan, mengambil keputusan dan melaksanakan pengelolaan sumber daya lokal yang ada. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan sosial serta tidak mengabaikan lagi nilai ekologi yang ketiganya harus berjalan berkelanjutan (Noor, 2011:88)

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan ke dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat. Pendampingan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan kelompok-kelompok sosial seperti pengajaran, pengarahan atau pembinaan dalam kelompok dan bisa menguasai, mengendalikan serta mengontrol orang-orang yang mereka dampingi. Dalam pendampingan lebih pada pendekatan kebersamaan, kesejajaran atau kesederajatan kedudukan (Reni,2012:13)

Dalam melaksanakan pendampingan demi tercapainya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting, salah satunya pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang tidak mencari keuntungan materi, didirikan sukarela oleh masyarakat, dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, seperti yang dikemukakan PBB. LSM melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, menyampaikan keinginan warga negara kepada pemerintah, memonitor implementasi kebijakan dan program dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan negara (Reni,2012:20)

Perhutanan Sosial adalah suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Permen LHK No. P83, 2016:4)

Sasaran utama dari program Perhutanan Sosial adalah masyarakat sekitar hutan. Perhutanan Sosial dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. (Noor, 2016:1)

Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, Agroforestri adalah salah satu bentuk kegiatan yang menunjang Perhutanan Sosial yang memiliki arti manajemen pemanfaatan lahan secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Agroforestri menerapkan satu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan sebagian lahan hutan sebagai pengganti lahan pertanian tanpa merusak ekosistem dan kondisi lingkungan hutan. Dalam pengembangan agroforestri tidak hanya terfokus pada teknik dan biofisik saja akan tetapi kebijakan pemerintah yang dibuat sebagai aturan dalam penggunaan sistem agroforestri juga sangat menentukan perkembangan agroforestri selanjutnya. Kegiatan agroforestri di kawasan hutan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan tetap mempertahankan kondisi hutan. Kegiatan agroforestri juga dilakukan sebagai kegiatan untuk rehabilitasi hutan karena sifat kegiatan agroforestri yang konservatif dan protektif. (Noor, 2016:3)

B. Rumusan Masalah

Di Nagari Sirukam terdapat Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa atau dalam istilah lokal disebut dengan Hutan Nagari yang didampingi oleh KKI (Komunitas Konservasi Indonesia) Warsi. LSM tersebut menjadi fasilitator Nagari Sirukam dalam Perhutanan Sosial sejak tahun 2009. KKI

Warsiperlumelakukan pendampingan di Nagari Sirukam dengan kajian potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat karena kondisinya di nagari tersebut belum memanfaatkan potensi yang ada di nagari. Dari hasil pengkajian dan didasarkan pada sejarah nagari bahwa wilayah tersebut cocok ditanami kopi dan kayu manis. KKI Warsi kemudian berdiskusi dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN), perwakilan kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan untuk membudidayakan tanaman kopi.

Dalam melakukan program pendampingan tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Dari survei di lapangan, diketahui pendampingan dilakukan oleh satu orang dari KKI Warsi untuk memfasilitasi Nagari Sirukam dalam pengembangan tanaman kopi arabika yang cocok di dataran tinggi. Masyarakat yang mengikuti pendampingan sejumlah 22 orang yang berasal dari 4 jorong di Nagari Sirukam. Jorong tersebut di antaranya Jorong Gantiang, Koto Tinggi, Kubang Nan Duo dan Lubuak Pulai. Penerima manfaat program terdiri dari anggota LPHN, kelompok tani, maupun yang bukan anggota kelompok tani.

KKI Warsi mengirim masyarakat dampingan tersebut untuk melakukan studi lapang di Berangin, Solok Selatan yang sudah berhasil mengembangkan kopi. Di sana, mereka belajar dan mengamati langsung budidaya tanaman kopi dari pembibitan hingga panen. Setelah studi lapang, fasilitator dan penerima manfaat membuat demplot (percontohan) pembibitan kopi menggunakan dana awal dari KKI Warsi, kas LPHN dan dana bantuan dari pemerintah nagari. Pembuatan demplot pembibitan kopi menggunakan lahan di Hutan Nagari. Dari pembibitan dihasilkan 1000 bibit kopi. Setelah 8 bulan pembibitan di demplot, bibit kemudian ditanam di lahan masing-masing penerima manfaat. Setiap penerima manfaat memperoleh sekitar 45 bibit kopi.

Pada penanaman kopi di lahan dilakukan pemeliharaan tanaman kopi dengan pemupukan secara berkala dan pengendalian gulma serta hama penyakit tanaman. Namun, terdapat kendala pada pemeliharaan terhadap tanaman kopi yang belum dapat ditanggulangi oleh penerima manfaat. Kendala selanjutnya, pendamping program tidak memiliki latar belakang ilmupertanian.

Dari pemaparan yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa penerima manfaat perlu mendapat pendampingan lebih intensif dari pendamping yang ahli di

bidangbudidaya kopi. Jika hal tersebut tidak segera ditanggulangi maka penerima manfaat tidak dapat melakukan pemeliharaan secara optimal pada tanaman kopinya. Hal ini yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap peran pendampingan yang dilakukan KKI Warsi terhadap pengembangan kopi oleh penerima manfaat di Hutan Nagari Sirukam. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu KKI Warsi untuk mengetahui bagaimana persepsi penerima manfaat terhadap pendampingan tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima manfaat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka timbul pertanyaan penelitian bagaimana peran pendampingan KKI Warsi dalam pelaksanaan program pengembangan agroforestri kopi di Nagari Sirukam serta bagaimana persepsi penerima manfaat terhadap pendampingan tersebut? Dengan demikian, penulis merasa perlu melakukan penelitian judul “Peran KKI Warsi dalam Pendampingan Pengembangan Agroforestri Kopi di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok”.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran pendampingan KKI Warsi dalam pelaksanaan pengembangan agroforestri kopi di Nagari Sirukam
2. Mendeskripsikan persepsi penerima manfaat program terkait peran pendampingan KKI Warsi terhadap pengembangan agroforestri kopi di Nagari Sirukam

D. Manfaat

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang Perhutanan Sosial dan pendampingan program pengembangan agroforestri kopi oleh KKI Warsi
2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan di tingkat nagari
3. Sebagai acuan bagi penelitian sejenis pada waktu yang akan datang
4. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Solok untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah khususnya Dinas Kehutanan
5. Sebagai bahan masukan bagi KKI Warsi